

**QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL *MIDDLE POWER*:
EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
INDONESIA SEBAGAI *BRIDGE-BUILDER* DI DEWAN KEAMANAN PBB
PADA ERA PRESIDEN JOKO WIDODO**

Hino Samuel Jose

ABSTRAK

Kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman dan semakin dewasanya politik luar negeri Indonesia di bawah berbagai era kepemimpinan dari era yang lebih otokratis menuju era yang lebih demokratis. Salah satu lini yang menjadi fokus kebijakan luar negeri Indonesia adalah bagaimana Indonesia menjalankan diplomasinya di berbagai forum multilateral sebagai PBB. Tantangan tentunya tetap ada mengingat posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*) harus menghadapi tarik ulur politik dengan negara berkekuatan besar (*major power*) dalam institusi internasional seperti PBB. Terdapat urgensi untuk mengetahui bagaimana proses perubahan struktur (restrukturisasi) kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan peran Indonesia sebagai negara *middle power* pada forum multilateral. Pada penelitian ini, forum multilateral yang menjadi pembahasan adalah Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang merupakan forum politik tertinggi yang menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum internasional. Tentunya dalam hal ini perbandingan diplomasi menengah dari Korea Selatan, Jepang, Vietnam, dan Malaysia menjadi elemen analisis penting untuk menganalisis peran Indonesia di DK PBB. Oleh karena itu, dalam penyelesaian beberapa isu politik keamanan internasional yang menjadi perhatian Indonesia, restrukturisasi dibutuhkan sebagai cara agar peran yang dipilih Indonesia, yaitu menjadi pembangun jembatan (*bridge-builder*) dapat terlaksana secara berkesinambungan. Namun tentunya hal ini tidak lepas dari sejarah dan faktor yang berpengaruh kepada proses pembentukan kebijakan luar negeri dari masa ke masa. Penelitian ini sendiri dilakukan menggunakan teori restrukturisasi model kebijakan luar negeri dari Holsti dengan konsep *middle power* sebagai kerangka berpikir penelitian. Metode yang dilakukan adalah studi kualitatif dari sumber – sumber ilmiah dan observasi penulis pada pelaksanaan keanggotaan Indonesia di DK PBB tahun 2019 – 2020. Penelitian ini menyimpulkan adanya korelasi positif dalam analisis konvergensi restrukturisasi negara *middle power* dengan apa yang dialami oleh Indonesia dalam prosesnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada era Presiden Joko Widodo yang memiliki karakter diplomasinya sendiri.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Kekuatan Menengah, DK PBB, Pembangun Jembatan, Diplomasi Multilateral.

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

***QUO VADIS OF MIDDLE POWER'S MULTILATERAL DIPLOMACY: THE
EXPLORATION OF INDONESIA'S FOREIGN POLICY
RESTRUCTURIZATION AS A NON PERMANENT MEMBER OF THE UN
SECURITY COUNCIL UNDER PRESIDENT JOKO WIDODO ERA***

Hino Samuel Jose

ABSTRACT

Indonesia's foreign policy is constantly changing from time to time following the time and maturing process of Indonesia's foreign policy from an autocratic to a more democratic era. Multilateral diplomacy became the focus of Indonesia's foreign policy especially within the United Nations (UN). The challenge, of course, remains given that Indonesia's position as a middle power country must face political tug-of-war with major powers in international institutions such as the United Nations. There is an urgency to identify how the process of Indonesia's foreign policy restructuring is carried out as an effort to maintain the continuity of Indonesia's role as a middle power country in multilateral forums. In this study, the multilateral forum being discussed is the UN Security Council (UNSC) as the highest political forum that produces legally binding decisions on international law. This study employs South Korea, Japan, Vietnam, and Malaysia as the analytical unit in analyzing Indonesia's role in UNSC. Therefore, in resolving several international security and political issues that are of concern to Indonesia, restructuring is needed as a way so that Indonesia's chosen role, namely being a bridge builder, can be carried out in a sustainable manner. But of course this cannot be separated from history and factors that influence the process of forming foreign policy from time to time. This research was conducted using the theory of restructuring the foreign policy model from Holsti with the concept of middle power as the theoretical framework. Qualitative research method is used based on data from scientific sources and the author's observations on the implementation of Indonesia's membership in the UN Security Council in 2019 - 2020. This study concludes that there is a positive correlation in the analysis of the convergence of restructuring of middle power countries with what Indonesia experienced in the process as a non permanent member of the UN Security Council in the era of President Joko Widodo that has its own diplomatic character.

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Keywords: Restructurization, Middle Power, UN Security Council, Bridgebuilder, Multilateral Diplomacy.

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]